

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM UNTUK TERWUJUDNYA TUJUAN PEMIDANAAN**

**Oleh  
ANNISA SETYORINI**

Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, namun penjatuhan pidananya harus mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Permasalahan: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan No: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk dan apakah penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas hakim, jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (c) UU SPPA. Secara filosofis pidana pelayanan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku anak agar menjadi lebih baik. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap anak. Penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 KUHP Nasional yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Saran kepada hakim anak agar memperluas pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat, tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perkembangan psikologis dan potensi perbaikan perilaku anak. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sosial agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional terkait pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

**Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Pelayanan Masyarakat, Tujuan Pemidanaan.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF COMMUNITY SERVICE PUNISHMENT TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW TO ACHIEVE THE PURPOSE OF PUNISHMENT**

**By  
ANNISA SETYORINI**

*Conditional community service sentences can be imposed on children in conflict with the law, including children who commit crimes without the right to carry sharp weapons as regulated in Article 2 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, however, the imposition of the sentence must refer to Article 71 Paragraph (1) letter (c) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). Problem: what is the basis for the judge's consideration in imposing community service sentences on children in conflict with the law in Decision No: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk and whether the imposition of community service sentences on children in conflict with the law is in accordance with the purpose of punishment.*

*The research approach uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data is done with literature study and field study procedures. The research sources consist of judges, prosecutors and community counselors. Data analysis is done qualitatively to answer research problems.*

*The results of this study indicate that the basis for judges' considerations in imposing community service sentences on children in conflict with the law legally refers to the provisions of Article 71 Paragraph (1) letter (c) of the SPPA Law. Philosophically, the community service sentences imposed are intended to improve the child's behavior to make it better. Sociologically, judges consider the existence of aggravating and mitigating circumstances for children in conflict with the law. The imposition of community service sentences on children in conflict with the law is in accordance with the objectives of punishment as referred to in Article 51 of the National Criminal Code, namely preventing criminal acts by enforcing legal norms for the protection and care of society, socializing convicts by providing guidance and mentoring so that they become good and useful people, resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of security and peace in society; and fostering a sense of regret and freeing the convict from guilt.*

*Advice to juvenile judges to broaden considerations in imposing community service sentences, not only limited to normative aspects, but also to pay attention to the needs of psychological development and the potential for improving children's behavior. The government through the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Social Affairs to prepare a National Standard Operating Procedure (SOP) related to the implementation of community service sentences for children in conflict with the law.*

**Keywords: Sentencing, Community Service, Purpose of Sentencing.**